



**MIMBAR ALAT KELENGKAPAN DEWAN**  
 **DPRD KOTA YOGYAKARTA**

**Pansus Raperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia Kedepankan Tiga Aspek**



**YOGYA (KR)** - DPRD Kota Yogyakarta kini tengah intensif membahas produk hukum berupa peraturan daerah (perda) terkait kesejahteraan warga lanjut usia (lansia). Melalui panitia khusus (pansus) yang sudah dibentuk, terdapat tiga aspek utama yang menjadi perhatian yakni kesejahteraan di bidang sosial, ekonomi, dan kesehatan.

Ketua Pansus Raperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia DPRD Kota Yogyakarta Ririk Banowati Permanasari, mengungkapkan tiga aspek tersebut menjadi dasar utama dalam mewujudkan lansia yang produktif. Hal ini mengingat jumlah penduduk lansia di Kota Yogyakarta yang cukup tinggi dan bahkan cenderung meningkat. Kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Pemkot Yogyakarta. Pasalnya dalam berbagai kesempatan, walikota kerap menyampaikan jika kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan kunci



*Jajaran Pansus Raperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia DPRD Kota Yogya meninjau Panti Wreda Budi Dharma.*

utama menuju kesejahteraan berkelanjutan. "Lansia yang tangguh dan modern menjadi peluang besar untuk mendukung serta mengisi kekosongan dalam hal pembangunan SDM," tandasnya.

Oleh karena itu melalui produk hukum yang tengah dibahasnya, aspek kesejahteraan sosial, ekonomi dan kesehatan menjadi hal yang cukup krusial bagi kalangan lansia. Ini lantaran kesempatan kerja yang terbatas menjadi penghalang bagi lansia yang masih ingin berkarya. Padahal lansia yang produktif akan menjadi kekuatan bagi Kota Yogyakarta dalam meningkatkan daya saing daerah.

Ririk yang duduk di Komisi D ini pun menilai,

upaya Pemkot Yogyakarta dalam menjamin kesejahteraan lansia sudah cukup baik. Dicontohkannya keberadaan Panti Wreda Budi Dharma yang dikelola Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta. Rumah singgah bagi lansia terlantar itu menjadi salah satu bentuk kehadiran pemerintah. Meski kebutuhan sandang, pangan dan papan sudah mampu terpenuhi namun tetap perlu ada sarana pendukung guna meningkatkan taraf hidup para lansia terlantar tersebut. "Kemarin kami beserta rombongan pansus sudah mengecek langsung kondisi di panti tersebut. Perlu ada pembenahan atau perbaikan sarana. Tentu ini



membutuhkan kebijakan dan juga anggaran. Kelak kehadiran perda bisa menjadi payung hukum sekaligus pedoman bagi jajaran Komisi D dalam mengawal hak-hak lansia," urainya.

Di samping itu, keberadaan sekolah lansia yang

target. "Dalam pembahasan di Komisi D, sudah ada kesepakatan bahwa tahun 2026 mendatang sekolah lansia akan dilambah sembilang titik. Lokasinya nanti akan kami bahas secara lebih teknis dengan mempertimbangkan jumlah lansia di tiap wilayah. Tetapi harapan kami nanti semua kelurahan terdapat sekolah lansia," papar Ririk.

Tak ketinggalan terkait jaminan kesehatan bagi lansia. Hal ini karena lansia memiliki kerentanan terhadap berbagai masalah kesehatan. Untuk itu harus ada jaminan deteksi dini penyakit agar derajat kesehatan bagi lansia juga semakin baik.

Menurutnya, kesejahteraan lansia merupakan tugas pokok pemerintah lantaran termaktub dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Sehingga dalam hal mewujudkan kesejahteraan lansia tersebut maka Pemkot Yogyakarta sudah seharusnya memiliki arah kebijakan yang baik hingga tataran teknis. Dirinya pun berharap tidak ada saling lempar tanggung jawab di tingkat organisasi perangkat daerah karena justru akan menjadikan disharmoni maupun faktor penghambat dalam mewujudkan kesejahteraan lansia.

Hal yang harus menjadi pemahaman bersama, im-

buh Ririk, ialah keberadaan warga lansia yang harus dipandang sebagai penduduk Kota Yogyakarta pada umumnya. Sehingga sangat berhak untuk mendapatkan fasilitas yang layak. Apalagi dalam penjiwaan aspirasi atau masukan dalam rapat dengan pendapat umum (RDPU) banyak usulan dari masyarakat terhadap fasilitas yang ramah bagi lansia terutama terhadap layanan publik yang dikelola Pemkot Yogyakarta.

"Pemkot Yogyakarta berkewajiban dalam memastikan pelayanan umum yang ramah bagi lansia. Komitmen ini tentunya harus diwujudkan secara berkesinambungan mulai dari rancang perancangan, kebijakan maupun pelaksanaan. Standarisasi fasilitas umum yang ramah lansia juga menjadi investasi jangka panjang," paparnya.

Terakhir, mengadopsi konsep Jogja Smart City yang tengah dikembangkan maka perlu mengoptimalkan peran lansia yang modern dan tangguh. Sehingga Pemkot Yogyakarta harus memberikan peluang kerja bagi lansia. Ini merupakan salah satu cara efektif dalam mengoptimalkan peran lansia dalam pembangunan daerah. Tentunya dengan mempertimbangkan faktor kesesuaian dan kecocokan sektor yang ingin dioptimalkan. (DH)



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005